Journal of Accounting Finance (JAF)
Volume 2, Nomor 2, Agustus 2021
P-ISSN: 2722-3132, E-ISSN: 2722-3124
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jaf
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

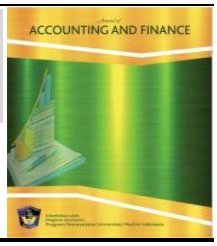

Peran Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Peningkatan Umkm Di Kabupaten Poso

Sugiati Esti Palupi[1], Baharuddin Semmaila[2], Serlin Serang[3].
[1] *Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Poso.*
[2,3]*Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
sti.palupi@gmail.com

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Salah satu tujuan dari UMKM adalah untuk peningkatan pendapatan serta efisiensi yang dapat dicapai dari UMKM. UMKM di Kabupaten Poso memegang peranan penting dalam memajukan perekonomian daerah. Hal ini dikarenakan jumlah UMKM yang jauh melebihi unit usaha besar dan telah menyebar hingga ke pelosok daerah di Kabupaten Poso. Namun, pada masa pandemi covid-19 tahun 2020, jumlah UMKM aktif menurun signifikan sebesar 54.7%. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji langkah strategis pemerintah Kabupaten Poso dalam rangka meningkatkan peran SDM pelaku UMKM untuk membangkitkan UMKM agar tetap berkreasi dan produktif dimasa pandemi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. UMKM Bangkit Mandiri merupakan program unggulan pemerintah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, yang bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan UMKM Kabupaten Poso di masa pandemi Covid-19, tidak hanya kualitas produk UMKM, tetapi juga sumber daya manusia (SDM) pelaku UMKM. Dalam program ini, pengembangan kapabilitas SDM pelaku UMKM didukung melalui kegiatan pelatihan peningkatan sumber daya usaha, seperti pelatihan desain, kerajinan dan jenis varian olahan pangan, pelatihan pemasaran dan transaksi di marketplace (online), pelatihan pengelolaan keuangan bagi UMKM, pelatihan pengelolaan usaha dan produksi, pendampingan perizinan bagi UMKM, serta pengembangan platform digital. Kegiatan-kegiatan tersebut mampu menaikan kuantitas UMKM aktif di Kabupaten Poso sebesar 100% dengan jumlah UMKM di tahun 2022 sebanyak 20.668 UMKM.

***Kata Kunci** : Penelitian kualitatif, Sumber daya manusia, UMKM.*

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are trading businesses managed by business entities or individuals referring to productive economic enterprises in accordance with the criteria stipulated by Law Number 7 of 2021. One of the objectives of MSMEs is to increase income and efficiency that can be achieved from MSMEs. MSMEs in Poso Regency play an important role in advancing the regional economy. This is because the number of MSMEs far exceeds large business units and has spread to remote areas in Poso Regency. However, during the 2020 COVID-19 pandemic, the number of active MSMEs decreased significantly by 54.7%. This study aims to examine the strategic steps of the Poso Regency government in order to increase the role of MSME actors to raise MSMEs to remain creative and productive during the pandemic. This study uses a qualitative approach that is descriptive analysis. MSME Bangkit Mandiri is the flagship program of the Poso District government, Central Sulawesi, which aims to empower and improve Poso District MSMEs during the Covid-19 pandemic, not only the quality of MSME products, but also the human resources (HR) of MSME actors. In this program, the development of HR capabilities for MSME actors is supported through training activities to increase business resources, such as design training, handicrafts and types of processed food variants, marketing and transaction training in the marketplace (online), financial management training for MSMEs, business management and production training. , licensing assistance for MSMEs, as well as the development of digital platforms. These activities were able to increase the quantity of active MSMEs in Poso Regency by 100% with the number of MSMEs in 2022 being 20,668 MSMEs.
Keyword: Qualitative research, human resources, micro small and medium enterprises (UMKM).

PENDAHULUAN

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup dimuka bumi yang semakin hari semakin meningkat, banyak hal yang bisa dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya adalah dengan cara melakukan suatu usaha. Karena dengan usaha dapat memberikan manfaat ekonomi sepanjang waktu baik untuk diri sendiri ataupun untuk perkembangan perekonomian suatu masyarakat. Usaha merupakan salah satu bagian kegiatan yang paling mudah dikerjakan oleh setiap orang selama orang tersebut memiliki tekad yang tinggi untuk melakukannya. Dalam aktivitas sehari-hari tidak lepas dari berbagai usaha layanan dan barang hasil kreasi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dimulai dengan aktivitas pagi hari ketika sarapan kita mencari bubur atau kue-kue makanan ringan yang dijual para pelaku UMKM, membeli kebutuhan pokok di warung dekat rumah, sampai menitipkan anak di playgroup terdekat yang juga adalah UMKM. UMKM merupakan potensi bisnis yang sangat digalakkan oleh pemerintah karena semakin banyak masyarakat berwirausaha maka semakin baik kokohnya perekonomian suatu daerah karena sumber daya lokal, pekerja lokal, dan pembiayaan lokal dapat terserap dan bermanfaat secara optimal. Usaha Kecil Menengah (UKM) atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) punya peran penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara. UKM diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dan bukan anak perusahaan atau anak cabang yang dimiliki, dikuasai, atau bagian dari sebuah usaha menengah atau usaha besar dan beberapa kriteria tertentu.

UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Namun, tingginya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan yang ada. Untuk mampu bersaing, UMKM harus mampu merumuskan strategi bersaingnya. Strategi ini disusun berdasarkan investigasi yang menyeluruh terhadap beberapa aspek, seperti kondisi pesaing, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan lainnya. Strategi bersaing yang tepat akan memudahkan UMKM dalam mengambil tindakan setiap operasional usahanya. Karena strategi merangkum semua kegiatan kritis organisasi, memberikan arah dan tujuan bagi organisasi. Mengembangkan suatu UMKM juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan, terutama meningkatnya perekonomian keluarga. Keluarga merupakan suatu kesatuan ekonomis, dimana fungsi keluarga disini meliputi pencari nafkah, perencanaan, pembelajaran, dan pemanfaatan. Sebagai suatu organisasi kecil dalam masyarakat, sebuah keluarga harus digerakkan dengan kecukupan dalam aspek ekonomi. Ekonomi juga bisa diartikan sebagai urusan keuangan rumah tangga yang dimana istilah ekonomi dimasyarakat biasanya berhubungan dengan permasalahan kaya dan miskin. Sebagai faktor pendukung, lingkungan sosial keluarga juga merupakan poin penting bagi terbangunnya proses sosial bagi anggota keluarga dalam menjalankan fungsi dan peran dalam masyarakat. Jadi penguatan ekonomi keluarga merupakan peningkatan urusan keuangan suatu rumah tangga demi mensejahterakan keluarga.

Beberapa penelitian terdahulu seperti Nurlinda, Junus Sinuraya (2020) UMKM berpotensi dalam menyangga perekonomian dimasa pandemic Covid-19. UMKM dimasa pandemic bisa bertahan dan tumbuh ketika memiliki sumber daya manusia yang menguasai teknologi digital. Juga Penelitian I. D. K. R. Ardiana dan I. A. Brahmayanti, Subaedi (2010) dengan Judul Penelitian Kompetensi SDM UKM dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UKM di Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM UKM memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja UKM. Hal ini juga didukung oleh hasil analisa determinasi. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap perekonomian. Namun, berbagai program pemberdayaan UMKM yang telah dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga (K/L) hasilnya belum optimal. Sebab itu, sinkronisasi dan harmonisasi program pemberdayaan UMKM diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, sehingga bisa meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian. Upaya tersebut memerlukan informasi mengenai sebaran dan jenis program pemberdayaan UMKM yang lengkap serta berbagai model pelaksanaan sinkronisasi. Pemberdayaan usaha mikro dapat membantu masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan hilangnya penghasilan karena usahanya terdampak pandemi Covid-19. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong tumbuhnya kembali usaha mikro, kecil, dan menengah lewat kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Bagi usaha mikro, pemerintah antara lain memberikan hibah bagi usaha pemula, serta menambah dana LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) Koperasi dan UMKM yang dapat digunakan untuk pinjaman murah bagi UMKM. Pemerintah juga memberikan subsidi bunga dan mempermudah persyaratan kredit atau pembiayaan dan pendanaan bagi UMKM, di antaranya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta memberikan keringanan pembayaran pinjaman bagi UMKM.

Dalam menghadapi masa pandemi Covid-19, Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, mencanangkan program 500 UMKM Bangkit Mandiri untuk mendorong UMKM tetap berproduksi di masa pandemic (definisi Bangkit) dan mampu memasuki Pasar Digital dan dapat bemitra dengan Perusahaan-Perusahaan Besar (definisi Mandiri). Mengingat fakta di lapangan bahwa UMKM aktif di Kabupaten Poso pada tahun 2019 berjumlah 13.095, dan menurun signifikan menjadi 5.937 di tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19. Program ini ditargetkan akan tercapai pada periode kerja 2021-2026, dengan target pertahun adalah 100 UKM bangkit dan mandiri. Program ini mengintegrasikan informasi dan potensi pengembangan UMKM yang ada di Kabupaten Poso secara keseluruhan. Dalam hal ini, Kabupaten Poso memiliki 3 (tiga) Kawasan Peruntukkan Industri (KPI), yang diatur dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) yaitu KPI Poso, KPI Pamona, dan KPI Lore dengan berbagai produk-produknya. Untuk meningkatkan kualitas produk-produk UMKM tersebut, diperlukan SDM pelaku UMKM yang juga berkualitas guna mewujudkan keberhasilan program ini, yang tentu saja akan berdampak pada kemajuan perekonomian daerah. Adapun masalah-masalah pengelolaan SDM yang sering dihadapi oleh UMKM, diantaranya adalah kesulitan dalam proses mengembangkan kompetensi pengelolaan UKM, menilai kinerja karyawan, menentukan reward dan punishment, dan menghadapi tuntutan karyawan. Oleh karena itu, Pemkab perlu menyusun langkah-langkah manajemen

SDM yang terencana dan tepat sasaran untuk meningkatkan UMKM di Kabupaten Poso. Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta mengetahui bagaimana UMKM yang ada di Kabupaten Poso, sebagai Penguatan Ekonomi Keluarga dengan judul:" Peran sumber daya manusia dalam upaya peningkatan UMKM Di Kabupaten Poso",

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Dalam perekonomian Indonesia UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur dalam payung hukum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ada beberapa kriteria yang
dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Definisi UMKM pertama diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Tulus Tambunan, (2012) dimana kriteria UMKM didasarkan pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Kemudian kriteria diubah melalui UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ukuran yang dipakai yakni berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Tetapi UU Cipta Kerja Cuma menetapkan kriterianya saja, tanpa mendeskripsikannya secara terperinci. Diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentag Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. PP ini memuat beragam regulasi kebijakan pada aspek kemudahan pendirian usaha, perizinan, fasilitasi, akses pembiayaan, akses ke rantai pasok sampai akses pasar bagi Koperasi dan UMKM. Kriteria UMKM menurut PP no 7 Tahun 2021 termuat pada pasal 35-36. Dalam Pasal itu diatur kriteria UMKM berdasarkan atas modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria Modal usaha diterapkan untuk pengelompokkan UMKM yang baru mau didirikan sesudah PP UMKM berlaku. Sedangkan kriteria penjualan tahunan dipakai untuk mengelompokkan UMKM yang sudah ada sebelum PP ini berlaku. Lebih lanjut adalah sebagai berikut:

a. Usaha Mikro, mempunyai modal usaha hingga dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000, - (satu miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
b. Usaha Kecil. Mempunyai modal usaha lebih Rp. 1-5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
c. Usaha menengah, mempunyai modal usaha Rp. 5 -10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Adapun Kriteria hasil penjualan tahunan yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) PP 7/2021 yaitu sebagai berikut:

a. Usaha Mikro, mempunyai hasil penjualan tahunan hingga dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
b. Usaha Kecil, Mempunyai hasil penjualan tahunan Rp. 2-15 miliar.
c. Usaha Menengah, mempunyai hasil penjualan tahunan Rp. 15- 50 miliar.

Karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah

Pandji Anoraga dalam bukunya menerangkan bahwa secara umum, sektor usaha mikro memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Sistem yang relatif administrasian pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadang kala pembukuan tidak di up to date sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
c. Modal terbatas
d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
e. Kemampuan pemasaran dan negoisasi serta diversifikasi pasar sangat tidak terbatas.
f. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pengertian Manajemen

Menurut Hasibuan (2004), manajemen berasal dari kata manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi fungsi manajemen itu sendiri. Sehingga manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini, manajemen dapat diartikan sebagai ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Disisi lain, Hasibuan, (2004) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses pengkoordinasian kegiatan-kegiatan pekerjaan sehingga secara eflsien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Dan menjelaskan bahwa manajemen secara umum mengacu pada perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan pada kegiatan yang dilakukan oleh setiap organisasi dalam rangka untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan sehingga menghasilkan efisiensi dalam kerasai produk atau jasa.

Pengertian Sumber Daya Manusia

Pada dasarnya, yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah setiap orang pada suatu organisasi. Sumber daya personal yang dimiliki perusahaan ini dipilih melalui proses rekrutmen dan seleksi sebagaimana yang menjadi tugas manajemen personalia Dalam suatu organisasi, sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Secara umum, sumber daya yang terdapat dalam suatu organisasi bisa dikelompokkan atas dua macam, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Dengan kata lain, sumber daya manusia adalah setiap individu yang bekerja di perusahaan yang dikelola untuk mencapai tujuan organisasi

Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Adapun beberapa pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia menurut para ahli adalah sebagai berikut:

a. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu kebijakan, praktik, dan sistem yang mempengaruhi perilaku, sikap dan kinerja karyawan Noe, et.al., (2010)
b. Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resources management) adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok karyawan Simamora, (2015).
c. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengambangan, kompensasi, promosi dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang ditetapkan Panggabean, (2014)
d. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah kegiatan yang meliputi: 'pengelolaan' orang, seperti menyusun persyaratan dan perencanaan staf, perekrutan dan seleksi karyawan, 'pengembangan', seperti menyelenggarakan pelatihan dan menyiapkan sistem penilaian; 'memberi kompensasi', seperti menetapkan sistem gaji dan kompensasi non-finansial, dan 'hubungan', misalnya yang berhubungan dengan aturan dan Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni atau preses memperoleh, memajukan atau mengembangkan, dan memelihara tenaga kerja yang kompeten sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan eñsien dan ada kepuasan pada diri pribadi

Penguatan Ekonomi Keluarga

Pengertian Penguatan Ekonomi Keluarga

Secara Bahasa penguatan memiliki arti yaitu perbuatan yang menguati atau menguatkan. (https://kbbi.kemdikbud.go.id) Penguatan merupakan upaya menumbuhkan peran kemandirian sehingga masyarakat baik tingkat individu, kelompok, keluarga, maupun komunitas memiliki tingkat kesejahteraan yang jauh lebih baik dari sebelumnya, memiliki akses pada sumber daya, memiliki kesadaran kritis, mampu melakukan pengorganisasian dan kontrol sosial dari segala aktivitas pembangunan yang dilakukan dilingkungan. Nasdian mengatakan bahwa Ekonomi secara umum dapat diartikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumberdaya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Dimana ruang lingkup ekonomi meliputi satu bidang perilaku manusia yang terkait dengan konsumsi, produksi, dan distribusi. Ekonomi juga bisa diartikan sebagai urusan keuangan rumah tangga yang dimana istilah ekonomi dimasyarakat biasanya berhubungan dengan permasalahan kaya dan miskin. Keluarga merupakan suatu kesatuan ekonomis, dimana fungsi keluarga disini meliputi pencari nafkah, perencanaan, pembelajaran dan pemanfaatan. Jadi berdasarkan pengertian diatas penguatan ekonomi keluarga merupakan peningkatkan urusan keuangan suatu rumah tangga demi mensejahterakan keluarga.

Pendapatan

Pendapatan adalah total penerimaan (uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu. Rahardja & Manurung (2010) mengatakan bahwa Pendapatan juga dapat diartikan kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, pendapatan dari kekayaan

seperti sewa, bunga atau deviden serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial atau asuransi pengangguran.
Jadi berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan hasil yang berupa uang atau hal materi lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa manusia.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan

1. Pendapatan Gaji atau Upah Pendapatan ini merupakan ganjaran dari pendapatan tenaga kerja yang bekerja dalam perekonomian.
2. Pendapatan dari Aset Produktif. Aset produktif merupakan aset yang memberikan pemasukan atas balas jasa penggunaannya.
3. Pendapatan dari Pemerintah (transfer payment) Pendapatan dari pemerintah atau penerimaan transfer (transfer payment) merupakan pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atau input yang diberikan. Negara-negara yang telah maju, penerimaan transfer diberikan, dalam bentuk tunjangan penghasilan bagi para penganggur, jaminan sosial bagi orang-orang miskin dan berpendapatan rendah.

Pendapatan Keluarga

Pada dasarnya tujuan orang bekerja adalah untuk dapat menghasilkan suatu yang namanya pendapatan. Pendapatan adalah merupakan balas jasa pekerjaaan setelah orang tersebut selesai melakukan pekerjaannya. Besarnya pendapatan yang diterima oleh seorang pekerja dipengaruhi oleh seberapa lama dia bekerja dan seberapa besar usahanya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Pendapatan juga adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh anggota masyarakat dalam jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor produksi yang telah mereka hasilkan dalam pembentukan produk nasional Suparyato, (2014).

Pondasi Adaptasi

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. (kemenkopukm.go.id). Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal lain yang mendasari dan mendorong perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja dan belum terintegrasi sehingga perlu dilakukan perubahan. Pertimbangan terbitnya PP nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 104, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Prinsip pemberdayaan dan tujuan pemberdayaan UMKM diatur sebagai berikut (https://www.gramedia.com/literasi/umkm/):

a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan Prakarsa sendiri.
b. Pengembangan usaha yang berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar
c. Perwujudan kebijakan public yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.
d. Peningkatan daya saing UMKM
e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian secara terpadu.

Lima pondasi adaptasi yang telah dijalankan di tahun ini diantaranya:

1. Kemudahan akses pembiayaan,
2. Kerluasan pasar dan digitalisasi,
3. Kemitraan,
4. Pendataan dan
5. Reformasi birokrasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu peneliti mengumpulkan data dengan cara langsung pada situasi tempatpenelitian melalui observasi/pangamatan dan wawancara dengan orang yang telah ditetapkan sebagai sampel. Dalam studi penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan atau menggambarkan keadaan subjek-subjek penelitian saat ini berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya. Sedangkan pendekatan penelitian yang akan dipakai guna memperoleh ketepatan dengan metode deskriftif ini secara kualitatif. Menurut Selvilla dkk (2006, 71) mengatakan bahwa: Metode penelitian kualitatif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang (sementara berlangsung). Tujuan utama menggunakan metode ini adalah untuk mengambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Dipandang dari segi tempatnya, research atau penelitian dapat digolongkan menjadi research laboratorium, research perpustakaan dan research kancah. Yang menjadi kajian penelitian ini adalah bagaimana peran sumber daya manusia dalam upaya peningkatan UMKM di Kabupaten Poso. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis, dimana penelitian ini hanya melukiskan suatu objek tertentu, kemudian setelah data terkumpul dilakukanlah analisa data untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Deskriptif merupakan fenomena yang berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena satu dengan fenomena lainnya Sukmadinata, (2015). Untuk kuantitatif aliran positivism, dimana dalam gejala, lebih bersifat tunggal, statis, dan konkrit. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling yaitu suatu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat sampel yang sudah diketahui sebelumnya. Sedangkan pemilihan sampel tidak bergantung pada kuantitas tetapi lebih pada kualitas orang yang akan diteliti yang disebut sebagai informan.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada kriteria berikut:

a) Tempat kerja peneliti.
b) Mengetahui kondisi di daerah tempat penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan responden atau informan yang dijadikan sebagai sumber data (narasumber) yang ditetapkan melalui prosedur tertentu. Burhan (2008:53) mengemukakan bahwa, prosedur sampling yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci atau situasi sosial tertentu yang syarat informasi dengan fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah sampel, tetapi bisa banyak, tergantung dari: (a) tepat atau tidaknya penelitian informan, (b) kompleksitas dan keragaman sosial yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian kualitatif ialah kata- kata dan tindakan. Data primer yang terdapat dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan sampel penelitian. Peneliti menggunakan data tersebut untuk mendapatkan informasi langsung tentang Peran Sumber daya Manusia dalam mengelolah UMKM guna peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Poso. Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan pendataan UMKM. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pelaku UMKM aktif. Untuk menganalisis data dari hasil observasi, digunakan teknik yang dikemukakan Miles dan Huberman (2007:20) dengan tiga tahap kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga tahap analisis tersebut dapat digambarkan sebagai model interaktif berikut.

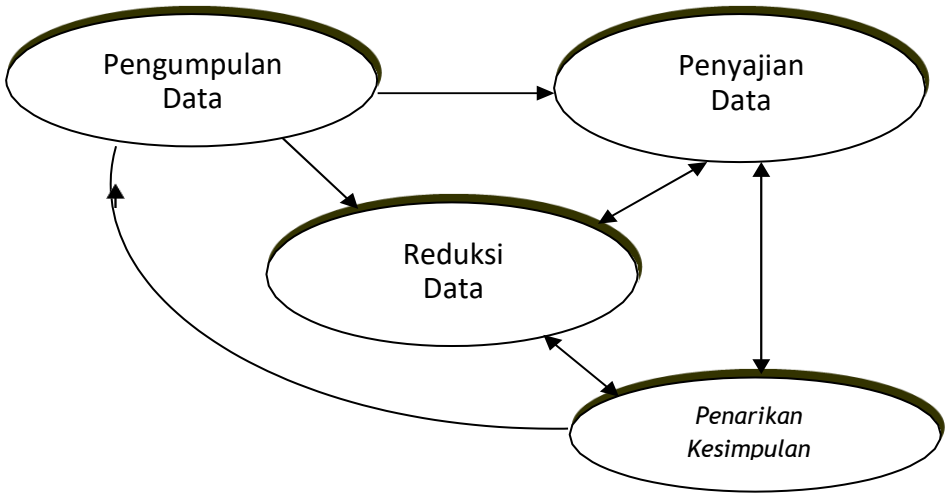

Gambar 2. Komponen Analisis Data Model Interaktif

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Profil UMKM

UMKM tidak hanya berbeda dengan Usaha Besar, tetapi dalam kelompok UMKM pun terdapat perbedaaan karakteristik antara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dalam sejumlah aspek yang dapoat dilihat sehari-hari. Aspek- aspek itu termasuk orientasi pasar, profil dari pemilik usaha, sifat dari kesempatan kerja di dalam perusahaan, sistem organisasi dan manajemen yang diterapkan di dalam usaha, derajat mekanisme di dalam proses produksi, sumber dari bahan baku dan modal, lokasi tempat usaha, hubungan eksternal dan derajat keterlibatan wanita sebagai pengusaha Tambunan, (2019). Disamping itu banyaknya jumlah Usaha Mikro disuatu daerah atau Kabupaten akan mencerminkan tingginya penyerapan

tenaga kerja. Hal ini sangat baik untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara khusus dan peningkatan serta kemandirian pendapatan anggaran daerah. Peningkatan jumlah UMKM juga harus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan yang ditimbulkan. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengertian dana desa yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini merupakan peluang bagi desa untuk mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian warganya. Namun peluang untuk memanfaatkan dana desa untuk pengembangan UMKM belum dimanfaatkan. Karena warga desa hanya mengetahui dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Adapun pemanfaatan dana desa selain untuk infrastruktur prosentasinya masih sangat kecil. Padahal dana Desa dapatdigunakan untuk pemanfaatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Dapat berupa pengembangan UMKM.

UMKM Kabupaten Poso

Salah tujuan dari UMKM adalah untuk peningkatan pendapatan serta efisiensi yang dapat dicapai dari UMKM, hal ini dapat tercapai jika adanya strategi-strategi pengembangan untuk usaha UMKM. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) telah menjadi salah satu alternatif yang dipilih pemerintah dalam upaya mengurangi pengangguran, mengentas kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penyumbang produk domestik bruto (PDB) Nasional memiliki peran penting bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung UMKM agar mampu bertahan, berkembang, dan bertumbuh di tengah tantangan pandemi dan transformasi melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satu yang menyebabkan UMKM di Kabupaten Poso memiliki kedudukan yang khusus dalam perekonomian adalah jumlahnya yang sangat melebihi dari unit Usaha Besar. Hal ini juga di dukung bahwa UMKM telah merambah pada pelosok daerah di Kabupaten Poso. Sehingga usaha ini memiliki signifikansi tersendiri yang khusus bagi ekonomi pedesaan. Dengan kata lain kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi desa sangat ditentukan oleh kemajuan dari UMKM itu sendiri.

Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kabupaten Poso memiliki gebrakan di Tahun 2021 yang sejalan dengan misi pembangunan daerah, di antaranya:

1. Desa Maju (pendistribusian dan penyaluran hasil produksi petani lokal ke konsumen);
2. Poso Sejahtera (pemberdayaan dan peningkatan kapasitas Pelaku UMKM dan Koperasi menuju go-digital);
3. Poso Pakaroso (optimalisasi pelayanan publik);
4. Poso Bersinar dan Terdepan (pengelolaan Pasar Rakyat yang bersih dan nyaman, pendirian Pusat Oleh-Oleh, serta optimalisasi kawasan kuliner di area Ruang Terbuka Hijau dan Alun-Alun Lapangan Sintuwu Maroso).
5. Pembangunan Basis Data Tinggal K-UMKM
6. UMKM Bangkit Mandiri

Dalam pengembangan UMKM, manajemen Sumber Daya Manusia harus mampu mengelola dengan baik agar unit usaha tidak mengalami kemunduran atau kebangkrutan. Tenaga kerja atau sumber daya yang secara kuantitas dan kualitas sangat berpengaruh terhadap keberlangusngan hidup untuk saling bersaing dengan UMKM lain atau perusahaan yang lebih besar lagi dalam satu unit bidang UMKM yang sama. Sehingga, unit usaha UMKM harus memiliki strategi perencanaan Sumber Daya Manusia untuk memperbaiki pengelolaan bisnis unit usaha UMKM tersebut. Dengan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang baik akan menciptakan pengelolaan bisnis yang baik hingga akhirnya akan mengakibatkan terciptanya daya saing yang berkualitas diantara bisnis UMKM lain. Manfaat bisnis UMKM ini sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Poso yang memiliki kreatifitas usaha dan mau untuk maju dalam peningkatan kesejahteraan dengan komitmen mewujudkan Produk yang aman dan berkualitas. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha:

1. Label dan kemasan, pengembangan Kemasan Seperti Merk, logo dan Coorporate Identity, Hal ini mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun2018 tentang Label Pangan Olahan
2. Izin Edar dan Keamanan Produk pangan/olahan pangan terkait dengan pengemasan seperti P-IRT, MD BPOM.

Pada Poin ini berdasarkan pada aturan:

1. PP No. 24 Tahun 2018Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik
2. UU no. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen
3. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Penetapan Instrumen Verifikasi dan Validasi oleh Pendamping Proses Produk halal
4. Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
5. Legalitas untuk kualitas Produk, sertifikasi Halal, Standar Nasional Indonesia (SNI), Informasi Nilai gizi (Nutrition Facts), HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Aturan yang mengatur:

1. UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal
2. UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Tabel 8 Data UMKM yang Berada di Kabupaten Poso.

Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
Pamona Selatan	593	594	602	612	647
Pamona Barat	306	308	318	333	358
Pamona Tenggara	724	728	735	752	762
Pamona Utara	891	926	931	951	966
Pamona Pusalemba	835	887	907	950	1,015
Pamona Timur	481	520	535	547	554
Lore Selatan	124	152	156	173	175
Lore Barat	149	166	170	179	183
Lore Utara	170	172	185	200	212
Lore Tengah	85	85	90	102	105

Lore Timur	50	51	57	69	74
Lore Peore	167	181	191	206	209
Poso Pesisir	801	834	844	865	880
Poso Pesisir Selatan	379	391	401	424	429
Poso Pesisir Utara	203	239	254	272	292
Poso Kota	1558	1794	1824	1876	1960
Poso Kota Selatan	628	1353	1373	1446	1524
Poso Kota Utara	1360	1451	1469	1504	1557
Lage	1117	1149	1159	1174	1193

Pengembangan Industri olahan yang merupakan dari UMKM di Kabupaten Poso dilaksanakan berdasarkan potensi sumber ddaya industry unggulan dan termuat dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK). Ditetapkan 3 (tiga) Kawasan Peruntukkan Industri (KPI) Kabupaten Poso, Yaitu:

1. Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Poso
   - Aneka Industri Kripik (Kec. Poso Kota, Poso Kota Selatan dan Poso Kota Utara
   - Aneka Industri Gula Aren (Poso Pesisir, Poso Pesisir Selatan)
   - Aneka kelapaterpadu (Poso Kota, Poso Kota Utara, Poso Kota Selatan, Poso Pesisir, Poso Pesisir Selatan, Lage).
   - IKM Ikan Asap (Kec. Lage, Poso Kota Utara, Poso Pesisir dan Poso Pesisir Utara
2. Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Pamona
   - IKM Kerajinan Batik Poso (Kec. Pamona Utara dan Pamona Puselemba)
   - IKM Kerajinan Anyaman Rotan dan Bambu
   - IKM Olahan Minyak Sawit dan Minyak Atsiri
3. Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Lore
   - Kawasan Agro Industri dan Kopi

Dari data-data yang ada untuk Kabupaten Poso memiliki Produk-produk unggulan diantaranya adalah

I. Industri Tomat dan Capai
II. Olahan Kripik dan Aneka Kripik
III. Ikan Asap dan Abon Ikan
IV. Gula semut dan Gula Batok
V. Kopi Kering, Sangrai dan Bubuk
VI. Briket Arang
VII. Penyulingan Minyak Atsiri
VIII. Madu hutan dan Madu Trigona
IX. Batik Poso
X. Kain Tenun dan Inodo/Fuya
XI. Furniture Kayu dan Rotan
XII. Kerajinan Ukiran Kayu Eboni, Kerajinan Berbahan Kayu, Rotan, Batok Kepala, Pandan dan Bambu.

UMKM Kabupaten Poso di Masa Pandemi

Tabel dibawah ini menyajikan data Data UMKM aktif di Kabupaten Poso terdapat pada Tabel 9

Tabel 9 Persentase UMKM Aktif Kabupaten Poso, Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah UMKM aktif	11.981	12.201	12.635	13.095	5.937
2	Jumlah UMKM	11.981	12.201	12.635	13.095	13.095
3	Persentase UMKM aktif (%)	100	100	100	100	45,34

Sumber : RPJMD Kabupaten Poso 2021 - 2026

Berdasarkan table 9 terlihat penurunan persentase UMKM aktif pada tahun 2020 sebesar 54,66% dikarenakan Covid-19. Covid-19 berdampak ke segala sector, salah satunya sector ekonomi. Hal ini dirasakan secara signifikan oleh para Pelaku Usaha yang mengalami krisis ekonomi. Pemicunya adalah menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemic Covid-19 yang juga sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha UMKM. Krisis ekonomi yang dialami UMKM dapat menjadi ancaman.Secara menyeluruh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meluncurkan berbagai bantuan usaha untuk menjaga keberlangsungan UMKM agar mampu bertahan di masa COVID-19. Kabupaten Poso meluncurkan program UMKM Bangkit Mandiri Tahun 2021-2026, dengan Filosofi :

- "Bangkit", diartikan UMKM bisa tetap berjalan atau berproduksi di masa pandemic COVID-19.
- "Mandiri", diartikan mampu bermitra dengan perusahaan besar seperti Perusahaan retail (Alfamidi dan Indomaret), dan E- Commerce (Tokopedia, Lazada, Sofie, BukaLapak)

Realisasi pemberian bantuan Pemerintah yang telah disalurkan, rincian sebagai berikut :

1. BPUM Program Presiden 2 Tahap, mampu mengakomodir 12 ribu UMKM se Kabupaten Poso.
   a. Tahap Pertama dengan nilai bantuan sebesar Rp. 2.400.000, yang diberikan akhir tahun 2020
   b. Tahap Kedua dengan nilai bantuan sebesar Rp.1.200.000 dan diberikan pada awal tahun 2021
2. Bantuan Modal dari Daerah (Bupati) berjumlah 100 UMKM dengan setiap tahunnya diberikan bantuan untuk modal usaha sebesar Rp. 2.500.000 Dan dimulai pada tahun 2021, bantuan ini diberikan secara bertahap.

Dengan adanya bantuan dari Pemerintah ini diharapkan adanya gairah lagi bagi pelaku usaha yang diawal pandemi covid tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami atau merasakan langsung tejadinya keterpurukan usaha karena hampir semua sektor usaha khususnya pad sektor UMKM, bantuan ini adalah pemacu baru bagi dunia usaha UMKM.

1. Resources (Sumber Daya Manusia)
   Mengingat peran UMKM yang krusial sebagai salah satu penopang perekonomian, maka pelaku UMKM harus bisa menunjukkan kualitas baik dari segi produk maupun sumber daya manusianya. Meskipun bisnis UMKM masih terbilang baru dan kecil, tidak ada alasan untuk tidak mengesampingkan kualitas dan peran Sumber Daya Manusia. Kontribusi Sumber Daya Manusia yang baik akan berdampak bagi kesuksesan berusaha, kemampuan bersaing dan keberlangsungan UMKM kedepannya. Untuk membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mampu berkontribusi secara maksimal, dibutuhkan langkah manajemen SDM yang terencana Untuk Kabupaten Poso peningkatan sumber daya Manusia adalah bagian dari "UMKM Bangkit Mandiri", hal ini dikembangkan dalam bentuk dukungan sebagai berikut :
   1. Peningkatan Sumber Daya Usaha, melalui kegiatan :
      a. Pelatihan Desain Anyaman dan Kerajinan
      b. Pelatihan Olahan Pangan/Varian Olahan Pangan
      c. Bantuan Peralatan dan Bangunan Produksi.

2. Peningkatan Sumber Daya Pelaku Usaha (SDM), melalui kegiatan:
   a. Pelatihan Kompetensi dan Motivasi Wirausaha
   b. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Bagi UMKM
   c. Workshop Entrepreneur: Pelatihan Foto Produk, Pemasaran melalui media masa.
   d. pelatihan pemasaran dan transaksi di Marketplace (online)
   e. Pengenalan Teknologi Bagi Pelaku Usaha Industri
3. Pengaktifan Rumah Layanan Kemasan yang memfasilitasi desain Label dan Kemasan secara gratis dan pemesanan kemasan dengan minimum order.
4. Pengaktifan Sentra oleh-Oleh Kabupaten Poso dan dibuka dibeberapa tempat seperti objek wisata, Hotel-Hotel, dan Bandara.
5. Layanan Konsultasi dan Pendampingan pengurusan Perijinan dan legalitas Usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), BPOM, Sertifikat Halal, Haki, Perseroan Peroarangan, Nutrion Fact.
6. Bantuan akses pembiayaan bagi UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kerjasama dengan Perbankan.
7. Fasilitasi Pemasaran melalui MOU Pemerintah dengan Perusahaan Retail, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta. "UMKM Bangkit Mandiri"juga mengintegrasikan seluruh informasi dan potensi pengembangan UMKM.

Dinyatakan sebagai UMKM Bangkit Mandiri, apabila telah melewati 4 tahapan rencana Kerja, yaitu :

- Tahap 1
  Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Usaha dan Manusia seperti Pelatihan desain, Pelatihan olahan pangan, pelatihan Kerja, Pelatihan Kemasan, Pembuatan Label dan Logo serta Bantuan Peralatan
  Data pelaku UKM dan IKM yang telah dibina selama 3 tahun terakhir digunakan sebagai patokan untuk klasifikasi rencana kerja. Pembinaan yang telah dilakukan disini berupa pelatihan desain, pelatihan kerajinan, pelatihan olahan pangan, pelatihan kemasan, dll. Jika UKM dan IKM telah dibina melalui tahap ini, akan dilanjutkan ke TAHAP 2. Jika 500 UKM belum tercapai, dapat dilakukan pendataan kembali berdasarkan UKM dan IKM yang aktif di Kabupaten Poso.
- Tahap 2
  Pendampingan Perizinan seperti : Izin Usaha Industri, Nomor Induk Berusaha, Izin UMKM, PIRT, BPOM, Label HALAL, Email bagi setiap IKM dan UKM. Prosedur kerja sebagai berikut :
  a. Pada Tahap ini, UKM dan IKM yang telah melewati tahap I akan diberikan pendampingan untuk penerbitan Izin-izin Usaha yang Wajib dimiliki UKM dan IKM untuk pengembangan usaha.Dimana Izin tersebut berbeda-beda sesuai kriteria usaha
  b. Jika pada saat pendataan, terdapat UKM atau IKM yang telah memiliki Izin Usaha lengkap, tetapi belum melewati tahap I, akan ditinjau kembali perkembangan usahanya. Jika dianggap masih membutuhkan pembinaan Sumber daya usaha dan Manusia maka akan dikembalikan ketahap I. Tetapi jika dianggap mampu akan diteruskan ke tahap selanjutnya.
- Tahap 3
  Pembinaan dan Peningkatan Kelembagaan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Bagi UMKM, Pelatihan Pengelolaan Usaha dan Produksi, Pelatihan Kewirausahaan. Prosedur kerja sebagai berikut :
  a. Pada Tahap ini, UKM dan IKM akan dilakukan pembinaan untuk peningkatan kelembagaan, pengelolaan keuangan, menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan berbagai pelatihan peningkatan kualitas sumber daya pelaku usaha. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan potensi dan merubah mindset Pelaku UKM dan IKM sehingga mampu mengeksplor potensi dan kemampuannya.

b. Jika pada saat pendataan, terdapat UKM atau IKM yang telah memiliki mendapat pelatihan ini, tetapi belum melewati tahap I dan 2, akan dilihat kembali perkembangan usahanya. Jika dianggap masih membutuhkan pembinaan Sumber daya usaha dan Manusia maka akan dikembalikan ketahap I, dan Jika belum memiliki izin akan dikembalikan ketahap 2. Tetapi jika dianggap mampu dan lengkap akan diteruskan ke tahap selanjutnya.

- Tahap 4

Prosedur kerja sebagai berikut :

a. Pada Tahap ini, memfasilitasi UMKM agar dapat naik kelas melalui berbagai bentuk kegiatan, yakni dukungan akses pembiayaan UMKM, program peningkatan kapasitas pemasaran secara digital
b. usaha kecil yang belum dapat mengakses keuangan formal seperti Bank maka diberikan akses permodalan, sehingga tidak terjebak oleh lintah darat (rentenir). pinjaman yang diberikan harus bertujuan untuk modal kerja dan investasi dengan skema KUR Super Mikro dan KUR Reguler, dan selanjutnya baru kredit komersial.
c. Memperkenalkan dan mengembangan platform digital
d. "UMKM Bangkit Mandiri" yang mengintegrasikan seluruh informasi dan potensi pengembangan UMKM. Pemasaran digital juga sebagai proses promosi online, melalui marketplace dan E-Mart Yang ada di Kabupaten Poso.
e. Promosi Offline juga dikembangkan melalui ruang promosi, liflet, brosur yang disebar ke Instansi atau lembaga lain yang ada di Kabupaten Poso

KESIMPULAN DAN SARAN

1. UMKM di Kabupaten Poso memiliki kedudukan yang khusus dalam perekonomian adalah jumlahnya yang sangat melebihi dari unit Usaha Besar. Hal ini juga di dukung bahwa UMKM telah merambah pada pelosok daerah di Kabupaten Poso. Sehingga usaha ini memiliki signifikansi tersendiri yang khusus bagi ekonomi pedesaan. Dengan kata lain kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi desa sangat ditentukan oleh kemajuan dari UMKM itu sendiri.
2. Usaha Kecil Menengah (UKM) atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) punya peran penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara. UMKM diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dan bukan anak perusahaan atau anak cabang yang dimiliki, dikuasai, atau bagian dari sebuah usaha menengah atau usaha besar dan beberapa kriteria tertentu. UMKM memiliki peranan yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia meliputi: perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja, pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penyedia jaringan pengaman terutama untuk masyarakat berpendapatan rendah demi menjalankan kegiatan ekonomi produktif.
3. Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kabupaten Poso memiliki gebrakan di Tahun 2022 yang sejalan dengan misi pembangunan daerah, di antaranya:
   a. Desa Maju (pendistribusian dan penyaluran hasil produksi petani lokal ke konsumen);
   b. Poso Sejahtera (pemberdayaan dan peningkatan kapasitas Pelaku UMKM dan Koperasi menuju go-digital);
   c. Poso Pakaroso (optimalisasi pelayanan publik);
   d. Poso Bersinar dan Terdepan (pengelolaan Pasar Rakyat yang bersih dan nyaman, pendirian Pusat Oleh-Oleh, serta optimalisasi kawasan kuliner di area Ruang Terbuka Hijau dan Alun-Alun Lapangan Sintuwu Maroso).
   e. Pembangunan Basis Data Tinggal K-UMKM
   f. UMKM Bangkit Mandiri
4. UMKM Kabupaten Poso adalah UMKM Bangkit Mandiri, yang telah melewati 4 tahapan rencana Kerja, yaitu:

Tahap1 : Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Usaha dan Manusia seperti Pelatihan desain, Pelatihan olahan pangan, pelatihan Kerja, Pelatihan Kemasan, Pembuatan Label dan Logo serta Bantuan Peralatan

Tahap 2 : Pendampingan Perizinan seperti: Izin Usaha Industri, Nomor Induk Berusaha, Izin UMKM, PIRT, BPOM, Label HALAL, Email bagi setiap IKM danUKM.

Tahap 3 : Pembinaan dan Peningkatan Kelembagaan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Bagi UMKM, Pelatihan Pengelolaan Usaha dan Produksi, Pelatihan Kewirausahaan, dan berbagai pelatihan peningkatan kualitas sumber daya pelaku usaha.

Tahap 4 : Pembiayaan dan Promosi, meliputi akses pembiayaan bagi UMKM, pelatihan pemasaran serta pengembangan platform digital "UMKM Bangkit Mandiri" yang mengintegrasikan seluruh informasi dan potensi pengembangan UMKM.

5. Sumber daya manusia yang ada pada proses pengembangan UMKM dapat dikatakan berjalan dengan baik karena rata-rata para pelaku usaha sudah memiliki ijasaha SMA atau bahkan ada yang telah Sarjana (S1) dan ada yang sudah berijasah (S2), sehingga tugas seperti pengelolaan ataupun menajemen UMKM dapat dilaksanakan dengan baik.

Saran

1. Mengingat makin pentingnya peran Sumber Daya Manusia dalam proses pengembangan dan semakin besar tantangan yang harus dihadapi, perlu diantisipasi dengan adanya kebijakan-kebijakan mendasar dalam bentuk pola jaringan terstruktur, pelayanan, informasi, teknologi serta sumber daya manusia baik pada setiap bidang yang ditekuni dalam berusaha. Oleh karena itu peranan Lembaga-lembaga terkait baik pemerintah maupun swasta sangat dibutuhkan.
2. Pemerintah Kabupaten Poso hendaknya memberikan perhatian yang serius terhadap sektor strategis seperti UMKM karena diharapkan akan sangat mendorong terciptanya lapangan kerja baru dan membantu perekonomian Rumah Tangga agar lebih mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

Burhan. (2008)."Penelitian Kualitatif". Penerbit Kencana Prenada Media, Jakarta. Consuelo G. Sevilla, dkk 2006. "Pengantar Metode Penelitian" Penerbit UI Press, Jakata

Ferdian Tonny, 2014 "Pengembangan Masyarakat, Yayasan Pustaka Obor Jakarta Indonesia

Hasibuan, Malayu. 2004. "Manajemen Sumber Daya Manusia". Jakarta: Bumi Aksara.

Henry Simamora (2015), "Manajemen Sumber Daya Manusia", STIE YKPN Bandung.

I.D.K.R. Ardiana, I.A. Brahmayanti, Subaedi, 2010 "Kompetensi SDM UKM dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UKM di Surabaya ", VOL.12, NO. 1, MARET 2010: 42-55 Fakultas Ekonomi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Miles, M. B. & A. Huberman, M. (2007). "Analisis Data Kualitatif". Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Penerbit Universitas Indonesia Press. Jakarta.

Nana Syaodih Sukmadinata, (2015) "Penelitian 2. Education Research" Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung

Noiva Aristyani Esay dan R.R. Retno Ardianti (2013), "Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pada Usaha Mikro dan Kecil di Jawa Timur", AGORA Vol.1, No.3, (2013)

Pandji Anoraga, 2010. "Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro", PT. Dwi Chandra Wacana, Yogyakarta

Pusat pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI): Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2008),

Prathama Rahardja & Mandala Manurung, "Teori Ekonomi Mikro", (Jakarta: LP,FE-UI, 2010), Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. https://peraturan.bpk.go.id

Panggabean, Mutiara. 2014. "Manajemen Sumber Daya Manusia". Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rahmana, Arief. 2008. Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Informasi Terdepan tentang Usaha Kecil Menengah, (online), (http://infoukm.wordpress.com)

Robbins P. Stephen. 2004. "Organizational Behavior (Jilid1)". Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Suparyanto. 2014. "Konsep Dasar Pendapatan Keluarga." (http://dr-suparyanto.blogspot.co.id/2014/03/konsep-dasarpendapatan- keluarga.html.)

Tulus Tambunan, 2012. "Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia (UMKM), Isu-isu Penting", LP3ES, Jakarta.

Tulus Tambunan, 2019. "Pembangunan Ekonomi Perdesaan, Berbasis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif" Pustaka Setia, Bandung.

Bin Hasri, Sigit Santoso, Djoko Santoso Th "Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Daerah Di Kabupaten Ngawi" Magister Pendidikan Ekonomi Program Pascasarjana UNS.